



LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022/2023**

PALU, JANUARI 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022/2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bahan pertanggung jawaban Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2015 sesuai pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 05 Tahun 2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Materi yang disajikan dalam Laporan ini disusun dalam bentuk sistematika : Pendahuluan, Program/Kegiatan dan Sasaran, Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Daerah, Hasil yang Dicapai dan Dampak Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Hambatan dan Upaya Pemecahan, dan Penutup.

Disadari bahwa bahan yang disampaikan dalam laporan ini masih terdapat kekurangsempurnaan sehingga saran perbaikan sangat diharapkan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Palu, 2023

PLT. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



IR. A. RAHMANSYAH ISMAIL., M.Agr., M.P.
Pembina Utama Madya
NIP.19691016 199503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Dasar Hukum	4
B. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah	7
1. Visi	7
2. Misi	8
3. Arah Kebijakan	9
BAB II. PERUMUSAN STRATEGIS, PROGRAM/KEGIATAN DAN SASARAN	10
A. Perumusan Strategis	10
B. Program Kerja	13
C. Sasaran Kegiatan	26
BAB III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI DAERAH	27
A. Tugas Umum Pemerintahan	27
B. Tugas Pembangunan	35
C. Penyelenggaraan Dekonsentrasi	38
D. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	39
BAB IV. HASIL YANG DICAPAI DAN DAMPAK KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	40
BAB V. HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN	81
A. Hambatan Dan Permasalahan	81
BAB VI. PENUTUP	82

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian	Halaman
Lampiran 1.	Matriks Evaluasi Terhadap Hasil Rkpd Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	81
Lampiran 2.	Data Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Penagamanan Hutan Tahun 2022.....	145
Lampiran 3.	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	146
Lampiran 4.	Indikator Kinerja Kunci dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2022	147
.		
.		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6)

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Tengah Nomor 107) ;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 772);
17. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor DPPA/B.I/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 26 Oktober 2022

Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah

1. VISI

Visi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan kehutanan nasional, kerangka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan dalam lima tahun kedepan, maka visi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Sulawesi Tengah adalah:

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah bahwa pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih baik dari aspek fungsi ekologi dan fungsi ekonomi yang mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sehingga dapat mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, ditetapkan sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak;
2. Meningkatkan upaya penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta peningkatan pengamanan hutan dan penegakan supremasi hukum;

3. Meningkatkan hak kelola masyarakat melalui perhutanan sosial;
4. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM dan Kelembagaan di Bidang Kehutanan yang maju, mandiri, berdaya saing;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik yang Akuntabel, Adil dan Transparan.

2. Misi

1. Misi Pertama :

Memantapkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak dimaksudkan agar seluruh kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya di Provinsi Sulawesi Tengah dikelola secara optimal oleh unit management Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) dan Taman Hutan Raya (Tahura) yang berbasis resort, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.

2. Misi Kedua :

Meningkatkan upaya penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta peningkatan pengamanan hutan dan penegakan supremasi hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) pada kawasan hutan lindung dan produksi, perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan pelestarian alam TAHURA/kawasan ekosistem esensial, penurunan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.

3. Misi Ketiga :

Meningkatkan hak kelola masyarakat melalui perhutanan social dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan konflik tenurial sehingga masyarakat sekitar hutan dapat memperoleh hak kelola baik melalui pemberian IUPHKm, HPHD, IUPHTR, HR dan kemitraan serta hutan adat.

4. Misi Keempat :

Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM dan Kelembagaan di Bidang Kehutanan yang maju, mandiri, berdaya saing, dimaksudkan agar sumber daya manusia kehutanan (aparatur, pelaku usaha dan kelompok tani hutan) memiliki kemampuan dan keterampilan baik teknis maupun administratif dalam mengelola potensi sumberdaya alam hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

5. Misi Kelima :

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Publik yang Akuntabel, Adil dan Transparan, dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi pada bidang kehutanan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Arah Kebijakan

Dinas Kehutanan sebagai perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan instansi teknis yang bertanggungjawab dalam pembangunan kehutanan di daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat juga mengacu pada Kebijakan Pemerintah Daerah.

Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan sektor kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) dan produktivitas SDH;
2. Peningkatan perlindungan, konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
3. Peningkatan pengelolaan DAS serta rehabilitasi hutan dan lahan;
4. Peningkatan kapasitas dan areal kelola masyarakat serta penyelesaian konflik tenurial.

BAB II

PERUMUSAN STRATEGIS, PROGRAM/KEGIATAN DAN SASARAN

A. Perumusan Strategis

Perumusan strategis Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui pendekatan Analisis SWOT dengan melakukan pengelompokan dan analisis kondisi internal serta pengelompokan dan analisis kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam analisis ini diperlukan perhatian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

1. Kondisi internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan Kondisi Internal kelemahan (*weakness*).

I. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan yang dimiliki dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- Kepastian pembiayaan dari APBD dan dukungan APBN;
- Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hutan;
- Tersedianya kawasan hutan produksi dan lindung dengan luasan dan potensi memadai;
- Tersedianya Peraturan perundangan bidang kehutanan;
- Dinas Kehutanan diberikan kewenangan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung lintas kabupaten.

II. Kelemahan (*Weakness*)

Sedangkan *Kelemahan* yang perlu diperhatikan adalah :

- Kapasitas SDM masih rendah dan pemanfaatan yang belum optimal;
- Belum mantapnya kawasan hutan serta kurangnya data dan informasi kehutanan yang terintegrasikan;
- Produksi kayu dari hutan alam yang menunjukkan trend cenderung menurun dan kurangnya investasi karena jangka waktunya panjang dan waktu yang lama;

- Laju deforestasi dan degradasi cukup tinggi, luasnya lahan kritis dan banyaknya masyarakat miskin sekitar kawasan hutan;
- Masih banyaknya penebangan liar, perambahan kawasan, peredaran kayu ilegal serta penegakan supremasi hukum di bidang kehutanan belum optimal;

2. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal terdiri dari peluang (*opportunitiy*) dan tantangan (*threat*).

I. Peluang (*Opportunitiy*)

Berbagai *peluang* yang tersedia dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;
- Lapangan kerja sektor kehutanan yang cenderung meningkat;
- Permintaan pasar akan hasil hutan dalam/luar negeri cenderung meningkat;
- Semakin tingginya dukungan dan komitmen terhadap kehutanan dari pemerintah/lembaga lain dan pemerintah daerah;

II. Tantangan (*Threat*)

Sedangkan *tantangan* yang perlu diantisipasi dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

- Rendahnya koordinasi antar instansi kehutanan dan kurangnya komitmen UPT Kemenhut di daerah
- Terdapatnya kesenjangan (gap) antara kebutuhan konsumsi dan penyediaan produk hasil hutan
- Tuntutan penerimaan pendapatan daerah dari sektor kehutanan sebagai akibat euporia otonomi daerah
- Meningkatnya perambahan kawasan, pencurian dan perdagangan sumberdaya hutan secara ilegal;
- Meningkatnya jumlah penduduk dengan tingkat kesadaran pentingnya hutan masih rendah.

Setelah dilakukan pengelompokan dan analisis terhadap kondisi yang ada, selanjutnya semua informasi tersebut dimanfaatkan untuk menyusun matrik SWOT. Kisi-kisi yang terdapat pada matrik tersebut menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Matrik SWOT dimaksud menghasilkan 4 (empat) kisi alternative strategis dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Matrik SWOT

Internal Eksternal	Peluang (Opportunity)	Tantangan (Threat)
	Strategi S - O	Strategi S - T
Kekuatan (Strength)	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk meminimalkan tantangan
	Strategi W - O	Strategi W - T
Kelemahan (Weakness)	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan tantangan

Strategi S – O (Kekuatan – Peluang) :

- Reformasi birokrasi
- Mengoptimalkan hasil hutan kayu dan HHBK
- Menyediakan insentif dan kemudahan dalam usaha di bidang kehutanan
- Peningkatan pendanaan bidang kehutanan
- Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berbasis SDA

Strategi S – T (Kekuatan – Tantangan) :

- Melakukan diversifikasi produk hasil hutan
- Meningkatkan profesionalisme SDM Kehutanan
- Mengembangkan unit pengelola hutan (KPH) sebagai pengelola

- Meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan.
- Mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan dengan melakukan penyediaan bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan, melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan.
- Pengamanan hutan

Strategi W – O (Kelemahan – Peluang) :

- Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pendampingan LSM
- Reformasi birokrasi
- Mengoptimalkan hasil hutan kayu dan HHBK
- Menyediakan insentif dan kemudahan dalam usaha di bidang kehutanan
- Peningkatan pendanaan bidang kehutanan
- Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berbasis SDA

Strategi W – T (Kelemahan – Tantangan) :

- Mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan dan hasil hutan melalui penerapan pola pertanian menetap
- Pengembangan kelembagaan kehutanan
- Pengembangan hutan tanaman
- Mendorong investasi dalam usaha bidang kehutanan.
- Mendorong terciptanya pengembangan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan
- Percepatan penataan ruang kawasan kehutanan dalam revisi RTRWP

B. Program Kerja

Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

DINAS KEHUTANAN

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah/negeri
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur;
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan kepegawaian;
- 5) Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan dan asset.
- 6) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari :
 - a) Penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi program kehutanan
 - b) Pengembangan koordinasi dan informasi pembangunan kehutanan Sulawesi Tengah;
- 7) Program Planologi dan Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - b) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 8) Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan
 - a) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan
- 9) Program Pengendalian Perubahan Iklim, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 10) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - a) Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan;

- 11) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terdiri dari:
 - a) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial;
 - b) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - c) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik;
- 12) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Terdiri dari:
 - a) Kegiatan Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Konservasi serta Tanah dan Air;
 - b) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan DAS
 - c) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 13) Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari:
 - a) Kegiatan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
 - b) Kegiatan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
- 14) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Terdiri dari :
 - a) Kegiatan Kegiatan Peningkatan Penyuluhan

UPTD TAHURA

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari :
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri dari :
 - a) Pengelolaan Kawasan Konservasi
 - b) Konservasi Spesies dan Genetik

UPTD KPH DAMPELAS-TINOMBO

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan

UPTD KPH DOLAGO TANGGUNUNG

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan

UPTD KPH TOILI BATURUBE

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH DOLAGO TANGGUNUNG.

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH POGOGUL.

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH SINTUWU MAROSO

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :

- a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH SIVIA PATUJU

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH BALANTAK

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.

- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH TOPEASA MAROSO.

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :

- a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH PULAU PELING.

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH TOPEASA AROA.

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.

- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH BANAWA LALUNDU

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :

- a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH KULAWI

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

UPTD KPH GUNUNG DAKO

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
 - b) Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 4) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan;
- 5) Pengendalian Perubahan Iklim terdiri dari :
 - a) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari :
 - a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
- 7) Pengendalian DAS dan Hutan Lindung terdiri dari :
 - a) Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan Serta Konservasi Tanah dan Air;
- 8) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- 9) Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Peningkatan Penyuluhan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Planologi dan Tata Lingkungan.
 - b) Kegiatan Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c) Kegiatan Program Evaluasi dan Pelaporan.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran pembangunan kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pengelolaan hutan berbasis kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan;
- 2) Meningkatnya penerimaan iuran kehutanan dan industri hasil hutan yang bersertifikat legal;
- 3) Meningkatnya jumlah unit pengelolaan hutan pada tingkat tapak;
- 4) Terpeliharanya batas kawasan hutan;
- 5) Terkelolanya kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sesulawesi Tengah ;
- 6) Meningkatnya luas hutan tanaman dalam rangka menurunkan laju degradasi hutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- 7) Menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan strategis;
- 8) Meningkatnya kesadaran masyarakat/para pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan LH;
- 9) Pengelolaan kawasan pelestarian alam Tahura;
- 10) Terwujudnya perencanaan, pengawasan dan akuntabilitas pemerintah yang semakin meningkat. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah laporan keuangan Dinas Kehutanan tepat waktu dan akuntabel untuk mendukung pencapaian opini wajar tanpa pengecualian Pemda Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DI DAERAH

Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan (tugas desentralisasi dan dekonsentrasi) dibidang kehutanan.

A. Tugas Umum Pemerintahan

Tugas Umum Pemerintahan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat**, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :
 - Data pegawai, PNS yang diusulkan naik pangkat, kenaikan gaji, pensiun, pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional, peralihan status kepegawaian, bahan (data) untuk pembuatan kartu Pegawai (KARPEG), kartu TASPEN, kartu Suami/istri, kartu ASKES, permintaan usul peserta diklat, ujian dinas, prajabatan, pegawai yang akan mendapatkan penghargaan, permintaan DP-3, Pengaduan oleh istri/suami PNS lingkungan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan UPTD Kehutanan;
 - Menerima dan mendistribusikan surat masuk;
 - Mendistribusikan surat keluar.
 - Permintaan laporan bulanan, semester pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan;
 - Permintaan laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - Permintaan laporan realisasi Semester I Pendapatan dan Belanja SKPD, laporan Neraca SKPD per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1;

- Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada SKPD;
- Pelayanan permintaan pembayaran gaji PNS;
- Permintaan Laporan Tahunan Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji);
- Memproses administrasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan berupa verifikasi SPP dan penyiapan SPM;
- Permintaan Usulan Kegiatan Tahunan, Lima Tahun Pembangunan Kehutanan baik provinsi maupun masing-masing Dirjen lingkup Dephut;
- Permintaan Data Realisasi Kegiatan Bulanan, Triwulan dan Tahunan;
- Permintaan Data Tindak Lanjut dan Pemutahiran Data Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah/Irjen Kemen LHK;
- Permintaan Data oleh Biro Pusat Statistik secara insidental;
- Permintaan Data oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat dan Daerah);
- Permintaan untuk menerima Praktek Kerja Bagi Mahasiswa/Siswa dari Perguruan Tinggi dan SMU/Sederajat;
- Permintaan data dari Mahasiswa/Siswa dari Perguruan Tinggi dan SMU/Sederajat, serta instansi terkait lainnya.

2) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- Layanan pembinaan dan pengendalian dalam penataan hutan KPH kecuali KPHK dalam 1 (satu) Provinsi sesuai karakteristik KPH dan hak-hak masyarakat guna mendukung perencanaan dan pengelolaan KPH;
- Sosialisasi kepada pihak terkait dalam penataan hutan KPH
- Penetapan SOP penataan hutan KPH
- Pengembangan sistem informasi penataan hutan KPH dalam 1 (satu) Provinsi
- Bimbingan teknis dan monev penataan hutan pada KPH
- Layanan pembinaan dan pengendalian dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek KPH kecuali KPHK dalam 1 (satu) Provinsi berdasarkan hasil tata hutan;
- Sosialisasi dengan pemangku kepentingan dalam fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH

- Pengembangan kerja sama dan kemitraan, promosi serta investasi dalam rencana pengelolaan hutan KPH
- Penetapan SOP penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH
- Pengembangan rencana kelembagaan KPH
- Bimbingan teknis dan monev penataan hutan pada KPH
- Layanan penerbitan, pengendalian dan pengawasan izin pemanfaatan hutan di hutan produksi dan hutan lindung dalam provinsi sesuai kewenangannya;
- Penyediaan informasi bagi publik terhadap areal kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dimanfaatkan.
- Pelayanan tertib administrasi izin pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung sesuai ketentuan
- Pengawasan dan pengendalian penatausahaan, peredaran, dan tertib peredaran hasil hutan dari kawasan hutan negara dalam 1 (satu) Provinsi
- Pengembangan hasil hutan bukan kayu.
- Pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemanfaatan hutan antara masyarakat dan pemegang izin
- Bimbingan teknis dan monev pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung sesuai ketentuan.
- Layanan penerbitan, pengendalian dan pengawasan izin usaha primer hasil hutan bukan kayu yang berada di luar kawasan hutan sesuai kewenangannya;
- Penyediaan informasi bagi publik terhadap potensi hasil hutan bukan kayu.
- Pengawasan dan pengendalian penatausahaan, peredaran, dan tertib peredaran hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan negara dalam 1 (satu) Provinsi
- Pelatihan dalam pengembangan pengolahan dan pemasaran serta promosi hasil hutan bukan kayu.
- Pengembangan sistem informasi dan data base hasil hutan bukan kayu.
- Bimbingan teknis dan monev pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung sesuai ketentuan

- Layanan penerbitan, pengendalian dan pengawasan izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun sesuai kewenangannya
- Monitoring dan evaluasi sumber bahan baku
- Pengawasan dan pengendalian penatausahaan, peredaran, dan tertib peredaran hasil hutan kayu dari industri primer dalam 1 (satu) Provinsi
- Layanan pengelolaan, penyediaan dan pengendalian pemanfaatan KHDTK untuk kepentingan religi
- Penyediaan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
- Pendampingan pengembangan kerjasama/kemitraan pemanfaatan KHDTK untuk kepentingan religi.

3) Bidang Perlindungan dan KSDAE, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- Menyusun pedoman, materi pembinaan dan pengembangan kawasan konservasi alam skala provinsi;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait tentang penyebab bencana alam dan penanganan pasca bencana alam;
- Melaksanakan pelatihan jabatan teknis bagi peningkatan kompetensi Anggota Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan;
- Permohonan Pembuatan, Perpanjangan Kartu Tanda Anggota Polisi Kehutanan;
- Permohonan Pembuatan, Perpanjangan SIM Senjata Api;
- Permohonan Pembuatan, Perpanjangan Buku PAS Senjata Api;
- Permohonan Permintaan Data Senjata Api dan Amunisi Polisi Kehutanan;
- Melaksanakan koordinasi kegiatan Penyidikan kasus dalam Perkara Kehutanan;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemberian kesaksian perkara dan pemberian keterangan ahli dalam proses perkara, baik pidana maupun perdata;

- Menyiapkan bahan pelaksanaan lelang hasil hutan temuan, tangkapan dan sitaan hasil hutan illegal;
- Pengurusan Barang Bukti dari hasil kejahatan dan pelanggaran Kehutanan;
- Menerima laporan atau Pengaduan dari masyarakat dan LSM tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan Kawasan hutan dan hasil hutan;
- Penyiapan data dan informasi tentang kondisi gangguan keamanan Hutan;
- Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE;
- Meningkatkan Pelayanan umum yaitu Pengawasan dan Pengendalian terhadap pencurian hasil hutan (*illegal logging*).

1) **Bidang Pengelolaan DAS dan RHL**, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- Sosialisasi dan fasilitasi pendampingan rehabilitasi lahan melalui penghijauan pembangunan hutan rakyat, hutan kota dan lingkungan.
- Sosialisasi dan fasilitasi rehabilitasi lahan pada lahan gambut, mangrove dan pesisir/pantai
- Penyediaan dan pengembangan teknologi rehabilitasi lahan
- Pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara.
- Bimbingan teknis dan monev rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara
- Penetapan rencana pengelolaan DAS tingkat Provinsi
- Penetapan rencana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS
- Fasilitasi pembentukan forum koordinasi pengelolaan DAS
- Bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan DAS yang dilaksanakan oleh KPH
- Penyiapan/Penyajian data sumber benih, bibit tanaman hutan/MPTS.
- Pemantauan dan Pembinaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan oleh Pemegang Konsesi Ijin Pertambangan dan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan lainnya di Sulawesi Tengah.

2) **Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat**, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan dan Hutan Adat;
- Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan skala Provinsi;
- Menyiapkan bahan fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial skala Provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
- Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan;
- Menyediakan informasi terkait upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan berupa surat, laporan, press reliase, brosur, booklet dan leaflet; guna diberikan kepada masyarakat/lsm/instansi pemerintah terkait;
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi skala provinsi;
- Menyusun pedoman dan materi pembinaan masyarakat desa hutan, masyarakat adat serta masyarakat komunitas hutan skala provinsi;
- Melaksanakan koordinasi dengan kelompok-kelompok lembaga masyarakat dalam rangka usaha pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan;
- Menyiapkan bahan dalam penyusunan database KTH tingkat Propinsi;

- Menyiapkan bahan memantau perkembangan KTH tingkat Propinsi;
- Menyiapkan Bahan dalam memfasilitasi Pengembangan Usaha;
- Menyiapkan bahan metode dan materi Penyuluhan Kehutanan tingkat Propinsi;
- Menyiapkan bahan untuk memfasilitasi akses Informasi, teknologi, pasar dan permodalan;
- Menyiapkan Bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan penguatan Kelembagaan, penyuluhan, Peningkatan Kelas kelompok Tani Hutan di bidang kehutanan tingkat Propinsi;
- Menyiapkan bahan dalam penyusunan Programa dan materi penyuluhan dibidang kehutanan tingkat propinsi;
- Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan monitoring, Supervisi, Evaluasi, dan Pelaporan tingkat Provinsi.

6) UPT Taman Hutan Raya, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- Inventarisasi potensi kawasan TAHURA lintas Kab/Kota;
- Penataan kawasan TAHURA lintas Kab/Kota;
- Sosialisasi rencana pengelolaan TAHURA lintas Kab/Kota
- Sosialisasi perlindungan TAHURA lintas Kab/Kota;
- Penetapan SOP Perlindungan TAHURA lintas Kab/Kota;
- Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA;
- pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
- Penetapan SOP Pengawetan TAHURA lintas Kab/Kota;
- Bimbingan teknis dan evaluasi pemanfaatan TAHURA lintas Kabupaten oleh pemegang izin jasa lingkungan dan perusahaan wisata alam;
- Pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemanfaatan TAHURA lintas Kab/Kota;
- Penetapan SOP pemanfaatan TAHURA lintas Kab/Kota;
- Pembangunan sistem informasi pengawasan pemanfaatan TAHURA lintas Kab/Kota;
- Sosialisasi perlindungan daerah penyangga TAHURA lintas Kab/Kota;

- Penetapan SOP Pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kab/Kota;
- Inventarisasi desa di dalam dan sekitar TAHURA lintas Kab/Kota;
- Inventarisasi kondisi sosial ekonomi masyarakat masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA.
- Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA.

7) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- Melaksanakan penataan hutan di wilayah KPH.
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek KPH.
- Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH serta pemanfaatan wilayah tertentu.
- Melaksanakan perlindungan hutan pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di wilayah KPH.
- Melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang masuk dalam wilayah KPH.
- Melaksanakan penyuluhan kehutanan di wilayah KPH.
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah KPH.
- Melaksanakan pengelolaan DAS di wilayah KPH.

B. Tugas Pembangunan

Pelaksanaan Tugas Pembangunan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 ditunjang oleh sumber dana APBD untuk membiayai kegiatan sebagai berikut.

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian;
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - c) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - d) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 5) Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
- a) Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - b) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c) Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi
- 8) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari
- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 9) Program Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terdiri dari :
- a) Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi.
 - b) Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung.
 - c) Kegiatan Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan.

- 10) Program Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL).
 - b) Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara.
 - c) Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara.
 - d) Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan.
 - e) Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan.
- 11) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - a) Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
 - b) Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 12) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
 - a) Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - b) Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- 13) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun.
 - a) Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun.
- 14) Pelaksanaan Perbenihan Tanaman Hutan.
 - a) Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar.
 - b) Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit.
- 15) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
 - a) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 - b) Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi.

- c) Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
- 16) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan.
 - b) Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
 - c) Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
- 17) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - a) Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS.
 - c) Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS

C. Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus.

Dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi, pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh dana APBD, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Program Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL).
 - b) Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara.
 - c) Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara.
 - d) Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan.
- 2) Pelaksanaan Perbenihan Tanaman Hutan.
 - a) Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar.
 - b) Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit.
- 3) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
 - a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan.

- b) Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
- c) Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

D. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sejak terbentuknya organisasi Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sampai dengan saat ini, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak mendapat alokasi dana untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pembantuan.

BAB IV

HASIL YANG DICAPAI DAN DAMPAK KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Berdasarkan alokasi dana (APBD) tahun 2022 yang tersedia pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan maka diperoleh capaian hasil dan dampak sebagai berikut :

A. Sumber Dana APBD

1. Belanja Langsung

BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Masukan : Rp. 48.170.870.187 Realisasi : Rp 43.843.485.544
91,02 %
- Keluaran : Terbayar Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Hasil : Terciptanya Kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Kantor/kedinasan.

kegiatan sebagai berikut.

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari :

- Masukan : Rp. 1.002.365.230 Realisasi: 975.423.850 97,31%
- Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD, Jumlah Dokumen DPA-SKPD, Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Terlaksananya Monev Kinerja SKPD.
- Hasil : Terpenuhinya Dokumen RKA-SKPD, Jumlah Dokumen DPA-SKPD, Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD, Terlaksananya Monev Kinerja SKPD.
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

2) Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- Masukan : Rp. 48.218.640.687 Realisasi:Rp43.889.136.044
99,99 %
- Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
- Hasil : Terpenuhinya Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

3) Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari :

- Masukan : Rp. 48.218.640.687 Realisasi:Rp43.889.136.044
99,99 %
- Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, bahan pelaksanaan verifikasi, Tersedianya Laporan Akuntansi SKPD, Tersusunnya laporan keuangan berbasis akrual Terkelolanya tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
- Hasil : Terpenuhinya Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, bahan pelaksanaan verifikasi, Tersedianya Laporan Akuntansi SKPD, Tersusunnya laporan keuangan berbasis akrual Terkelolanya tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran..
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

4) Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari :

- Masukan : Rp. 255.136.800 Realisasi:Rp 254.209.800 99,64 %
- Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
- Hasil : Terpenuhinya Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

5) Program Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari :

- Masukan : Rp. 48.218.640.687 Realisasi:Rp 43.889.136.044 91,02 %
- Keluaran : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Permasalahan: - .
- Solusi : - .

6) Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- Masukan : Rp. 2.630.047.875, Realisasi: Rp 2.450.377.900 93,17 %
- Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Hasil : Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Permasalahan: - .

7. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

- Masukan : Rp. 667.108.275 Realisasi: Rp 663.051.328 , 99,39 %
- Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Hasil : Terpenuhinya Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor..
- Permasalahan: - .
- Solusi : - .

7) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

- Masukan : Rp. 667.108.275 Realisasi: Rp 663.051.328 , 99,39 %
- Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Hasil : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Permasalahan: - .
- Solusi : - .

8) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- Masukan : Rp 1.732.817.755 Realisasi:Rp 1.720.509.388, 99,29 %
- Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
- Hasil : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

9) Program Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terdiri dari :

- Masukan : Rp 324.825.000 Realisasi:Rp 322.052.788, 99,15 %
- Keluaran : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara , Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
- Hasil : Terpenuhinya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara , Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara .
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

10)Program Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, terdiri dari :

- Masukan : Rp 324.825.000 Realisasi:Rp 322.052.788, 99,15 %
- Keluaran : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara , Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
- Hasil : Terpenuhinya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara , Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara .
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

11)Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Masukan : Rp 459.819.075 Realisasi:Rp 459.819.075, 100,00 %

- Keluaran : Terlaksananya patroli pencegahan, pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan serta pembatasan kerusakan hutan di Prov. Sulteng, Terlaksananya Komunikasi yang terarah dengan Instansi Hukum terkait dalam Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hutan
- Hasil : Terpenuhinya patroli pencegahan, pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan serta pembatasan kerusakan hutan di Prov. Sulteng, Terlaksananya Komunikasi yang terarah dengan Instansi Hukum terkait dalam Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Hutan.
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

12) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

- Masukan : Rp 57.490.000 Realisasi:Rp 57.380.000, 99,81 %
- Keluaran : Terlaksananya penetapan pengadaan dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar, Tersedianya data sumber benih potensial, Tersedianya jaminan mutu bibit tanaman hutan yang berkualitas, Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BINWASDAL Peredaran Benih dan/atau bibit di KPH.
- Hasil : Terpenuhinya penetapan pengadaan dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar, Tersedianya data sumber benih potensial, Tersedianya jaminan mutu bibit tanaman hutan yang berkualitas, Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BINWASDAL Peredaran Benih dan/atau bibit di KPH.
- Permasalahan: - .
- Solusi : -

13) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

- Masukan : Rp 137.180.750 Realisasi:Rp 136.720.750, 100,00 %
- Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam .
- Hasil : Terpenuhinya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Permasalahan: - .
- Solusi : -.

14) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

- Masukan : Rp 888.531.125 Realisasi:Rp 887.961.375, 99,94 %

- Keluaran : Terlaksananya peningkatan kompetensi, pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana tenaga penyuluh kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Hasil : Terpenuhinya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Permasalahan: - .
- Solusi : - .

15)Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

- Masukan : Rp 290.857.700 Realisasi:Rp 287.244.775, 98,76 %
- Keluaran : Terlaksananya Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng, Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan DAS berbasis WEB, Terlaksananya Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi DAS Bagi Pemegang IPPKH (26 IPPKH), Terlaksananya Rapat Forum DAS yang diselenggarakan dalam setahun.
- Hasil : Terpenuhinya Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Prov. Sulteng, Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan DAS berbasis WEB, Terlaksananya Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi DAS Bagi Pemegang IPPKH (26 IPPKH), Terlaksananya Rapat Forum DAS yang diselenggarakan dalam setahun.
- Permasalahan: - .
- Solusi : - .

2. UPTD. TAHURA

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Masukan : Rp. 252.147.340 Realisasi: 244.637.850 , 97,02 %
- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

- Masukan : Rp 49.275.000 Realisasi:Rp. 48.518.000 98,46 %
- Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Hasil : Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Permasalahan : -
- Solusi : -.

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp 122.136.875 Realisasi:Rp. 119.403.075 97,76 %
- Keluaran :Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Hasil : Tersedianya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Permasalahan : -
- Solusi : -.

IV. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

- Masukan : Rp 122.136.875 Realisasi:Rp. 119.403.075 97,76 %
- Keluaran :Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi, Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA, Kegiatan Patroli dan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi.
- Hasil : Tersedianya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi, Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA, Kegiatan Patroli dan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi.
- Permasalahan : -
- Solusi : -.

3. UPT KPH DAMPELAS TINOMBO

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 252.147.340 Realisasi: 244.637.850 , 97,02 %
- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 86.509.896 Realisasi: 79.387.500 , 91,77 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 157.308.954 Realisasi: 153.405.450, 97,52 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.

- Masukan : Rp. 157.308.954 Realisasi: 153.405.450, 97,52 %

- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 1.437.344.925 Realisasi: 1.425.556.675, 99,18 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 36.544.100 Realisasi: 33.379.500, 91,34 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

- Masukan : Rp. 29.422.900 Realisasi: 25.442.300, 86,47 %

- Keluaran : Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun.
 - Hasil : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- VII. PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
- Masukan : Rp. 16.108.000 Realisasi: 14.858.000, 92,24 %
 - Keluaran : Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
 - Hasil : Tercapainya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- VIII. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
- Masukan : Rp. 753.053.155 Realisasi: Rp.722.132.350, 92,24 %
 - Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
 - Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -

4. UPTD KPH TOILI BATURUBE

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 246.299.833 Realisasi: Rp.226.899.082 , 92,12 %
 - Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- II. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH.
- Masukan : Rp. 30.000.000 Realisasi: Rp. 30.000.000, 100,00 %
 - Keluaran : Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah
 - Hasil : Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- III. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Masukan : Rp. 18.100.000 Realisasi: Rp 14.060.000, 77,68 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- IV. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Masukan : Rp. 70.500.000 Realisasi: Rp. 70.369.430, 99,81 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.

- Masukan : Rp. 37.500.000 Realisasi: Rp. 36.240.000, 96,64 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK).

- Masukan : Rp. 10.134.909 Realisasi: Rp. 9.900.000, 97,68 %
- Keluaran : Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi, Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan .
- Hasil : Terlaksananya Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi, Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 57.606.000 Realisasi: Rp.41.986.000, 72,88 %

- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IX. PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

- Masukan : Rp. 10.106.000 Realisasi: Rp 5.756.000, 56,96 %
- Keluaran : Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/tahun.
- Hasil : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
- Permasalahan: Tidak Terlaksananya Montoring Pembinaan
- Solusi : Melaksanakan kegiatan Monitoring

X. PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN DI KPH

- Masukan : Rp. 37.500.000 Realisasi: Rp 14.858.000, 77,95 %
- Keluaran : Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
- Hasil : Tercapainya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 898.267.300 Realisasi: Rp.879.957.150, 99,18 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.

- Permasalahan: -
- Solusi : -

XI. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- Masukan : Rp. 104.179.091 Realisasi: Rp. 65.830.000, 63,19 %
- Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
- Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

5. UPTD KPH DOLAGO TANGGUNUNG

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 288.223.812 Realisasi: Rp. 286.620.675, 99,44 %
- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 155.113.662 Realisasi: Rp 153.510.525, 98,97 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 92.830.000 Realisasi: Rp 92.830.000, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.

- Masukan : Rp. 27.570.160 Realisasi: Rp. 27.570.160, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK).

- Masukan : Rp. 151.688.750 Realisasi: Rp. 151.402.250 , 99,81 %
- Keluaran : Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi, Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan .
- Hasil : Terlaksananya Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi, Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 127.312.500 Realisasi: Rp. 127.267.500, 100,00 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

XII. PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

- Masukan : Rp. 12.399.375 Realisasi: Rp 12.399.375, 100,00 %
- Keluaran : Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun.
- Hasil : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
- Permasalahan: Tidak Terlaksananya Montoring Pembinaan
- Solusi : Melaksanakan kegiatan Monitoring

XIII. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- Masukan : Rp. 545.888.240 Realisasi: Rp. 527.284.875, 96,59 %
- Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
- Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

6. UPTD KPH BANAWA LALUNDU

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 698.545.061 Realisasi: Rp. 697.957.407, 99,92 %

- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 215.471.654 Realisasi: Rp 214.884.000, 99,73 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 169.758.025 Realisasi: Rp 169.758.025, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

-

IV. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 2.600.621.800 Realisasi: Rp. 2.591.724.800 , 99,66 %

- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 77.225.000 Realisasi: Rp. 77.225.000, 100,00 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

- Masukan : Rp. 10.800.000 Realisasi: Rp 10.800.000, 100,00 %
- Keluaran : Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun.
- Hasil : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
- Permasalahan: Tidak Terlaksananya Montoring Pembinaan
- Solusi : Melaksanakan kegiatan Monitoring

VII. PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

- Masukan : Rp. 60.984.000 Realisasi: Rp 60.984.000, 100,00 %
- Keluaran : Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
- Hasil : Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VIII. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- Masukan : Rp. 123.900.000 Realisasi: Rp. 123.140.000, 99,39 %
- Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
- Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

7. UPTD KPH KULAWI

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 258.286.941 Realisasi: Rp. 258.182.341, 99,96 %
- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 82.725.151 Realisasi: Rp 82.725.151, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 86.479.490 Realisasi: Rp 86.374.890 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.

- Masukan : Rp. 59.689.848 Realisasi: Rp. 59.604.848, 96,64 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

- Masukan : Rp. 57.230.329 Realisasi: Rp. 57.226.000, 99,99 %
- Keluaran : Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH.

- Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 1.016.517.905 Realisasi: Rp 1.016.020.825, 99,95 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 51.820.000 Realisasi: Rp. 51.790.000, 99,94 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VIII. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

- Masukan : Rp. 5.500.000 Realisasi: Rp 5.500.000, 100,00 %
- Keluaran : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- Hasil : Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- IX. PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
- Masukan : Rp. 60.984.000 Realisasi: Rp 60.984.000, 100,00 %
 - Keluaran : Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
 - Hasil : Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- X. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
- Masukan : Rp. 329.199.500 Realisasi: Rp. 309.652.500, 100,00 %
 - Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
 - Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -

8. UPTD KPH SINTUWU MAROSO

I. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Masukan : Rp. 328.227.445 Realisasi: Rp. 317.727.445, 96,80 %

- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp 232.030.145 Realisasi: Rp 231.879.491, 99,94 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 124.550.000 Realisasi: Rp 124.323.400 ,100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.

- Masukan : Rp. 257.009.291 Realisasi: Rp. 256.202.791, 99,69 %

- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 928.995.350 Realisasi: Rp 874.810.350, 94,17 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 182.789.100 Realisasi: Rp. 182.789.100, 100,00 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Masukan : Rp. 4.500.000 Realisasi: Rp 4.500.000, 100,00 %

- Keluaran : Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
- Hasil : Fasilitas Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
- Permasalahan: -
- Solusi : -

9. UPTD KPH SIVIA PATUJU

I. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Masukan : Rp. 117.124.193 Realisasi: Rp. 116.882.800, 99,79 %
- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp 152.993.100 Realisasi: Rp 152.106.500, 99,42 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 58.276.450 Realisasi: Rp 56.747.834, 97,38 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.

- Masukan : Rp. 87.361.214 Realisasi: Rp. 87.359.700, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 928.995.350 Realisasi: Rp 874.810.350, 94,17 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 182.789.100 Realisasi: Rp. 182.789.100, 100,00 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.

- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Masukan : Rp. 4.500.000 Realisasi: Rp 4.500.000, 100,00 %
- Keluaran : Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
- Hasil : Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IX. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- Masukan : Rp. 479.683.000 Realisasi: Rp. 479.056.000, 99,87 %
- Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
- Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

10. UPTD KPH BALANTAK

I. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Masukan : Rp. 245.118.335 Realisasi: Rp. 245.068.335, 99,98 %

- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Masukan : Rp 80.829.200 Realisasi: Rp 80.740.647, 99,89 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Masukan : Rp. 78.695.811 Realisasi: Rp 78.466.311, 99,71 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.
- Masukan : Rp. 85.955.919 Realisasi: Rp 85.955.919, 100,00 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan

dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK).

- Masukan : Rp. 40.410.880 Realisasi: Rp. 40.410.880, 100,00 %
- Keluaran : Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi, Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan .
- Hasil : Terlaksananya Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi, Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 549.554.530 Realisasi: Rp 549.554.530, 100,00 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 86.459.520 Realisasi: Rp. 86.459.520, 100,00 %

- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

- Masukan : Rp 6.416.280 Realisasi: Rp 6.416.280, 100,00 %
- Keluaran : Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun.
- Hasil : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
- Permasalahan: Tidak Terlaksananya Montoring Pembinaan
- Solusi : Melaksanakan kegiatan Monitoring

VIII. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Masukan : Rp. 4.500.000 Realisasi: Rp 4.500.000, 100,00 %
- Keluaran : Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
- Hasil : Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPH
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- Masukan : Rp. 111.206.870 Realisasi: Rp. 111.206.870, 100,00 %
- Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.

- Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

11.UPTD KPH PULAU PELING

I. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Masukan : Rp. 85.862.700 Realisasi: Rp. 78.589.782, 99,98 %
- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp 153.045.445 Realisasi: Rp 143.521.332, 93,78 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 26.099.005 Realisasi: Rp 24.586.200, 94,20 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan

Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

- Masukan : Rp. 20.181.324 Realisasi: Rp 14.858.000, 77,95 %
- Keluaran : Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
- Hasil : Tercapainya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IV. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 595.347.306 Realisasi: Rp 598.917.150, 100,60 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 40.169.800 Realisasi: Rp. 40.169.800, 100,00 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -

- Solusi : -
- VIII. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
- Masukan : Rp. 203.442.265 Realisasi: Rp. 202.611.550, 100,00 %
 - Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
 - Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -

12. UPTD KPH TEPE ASA AROA

I. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Masukan : Rp. 81.057.762 Realisasi: Rp. 81.057.762, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp 128.081.030 Realisasi: Rp 128.081.030, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp. 79.970.000 Realisasi: Rp 79.970.000, 100,00 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.
- Masukan : Rp. 31.950.000 Realisasi: Rp 31.950.000, 100,00 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- VII. PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
- Masukan : Rp. 102.164.000 Realisasi: Rp 102.164.000, 100,00 %
 - Keluaran : Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
 - Hasil : Tercapainya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- V. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA
- Masukan : Rp. 2.034.434.250 Realisasi: Rp 2.031.104.500, 99,84 %
 - Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.

- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 132.980.000 Realisasi: Rp. 132.980.000, 100,00 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

- Masukan : Rp 2.400.000 Realisasi: Rp 2.400.000, 100,00 %
- Keluaran : Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun.
- Hasil : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
- Permasalahan: Tidak Terlaksananya Montoring Pembinaan
- Solusi : Melaksanakan kegiatan Monitoring

VIII. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- Masukan : Rp. 25.200.000 Realisasi: Rp. 25.200.000, 100,00 %

- Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
- Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

13. UPTD KPH KPH GUNUNG DAKO

I. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Masukan : Rp. 61.669.350 Realisasi: Rp. 61.669.350, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan: -
- Solusi : -

II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp 87.435.830 Realisasi: Rp 84.367.404, 96,49 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Masukan : Rp 119.304.240 Realisasi: Rp 118.290.050, 99,15 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.

- Masukan : Rp. 15.000.000 Realisasi: Rp 15.000.000, 100,00 %
- Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VIII. PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

- Masukan : Rp. 18.930.000 Realisasi: Rp 18.930.000, 100,00 %
- Keluaran : Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
- Hasil : Tercapainya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 994.222.500 Realisasi: Rp 993.292.265 ,99,84 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.

- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 168.172.775 Realisasi: Rp. 168.172.775, 100,00 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VII. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- Masukan : Rp. 67.500.000 Realisasi: Rp. 67.500.000, 100,00 %
- Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
- Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

14. UPTD KPH KPH POGOGUL

I. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- Masukan : Rp. 61.669.350 Realisasi: Rp. 61.669.350, 100,00 %

- Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Hasil : Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tersedianya Bahan Logistik Kantor , Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- II. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Masukan : Rp 75.688.600 Realisasi: Rp 75.603.000, 99,89 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- III. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Masukan : Rp 104.163.500 Realisasi: Rp 104.083.800, 99,92 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Hasil : Terlaksananya Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Permasalahan: -
 - Solusi : -
- IV. PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI.
- Masukan : Rp. 17.750.000 Realisasi: Rp 17.750.000, 100,00 %
 - Keluaran : Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

IX. PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

- Masukan : Rp. 85.856.966 Realisasi: Rp 85.856.966, 100,00 %
- Keluaran : Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting.
- Hasil : Tercapainya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah, Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting
- Permasalahan: -
- Solusi : -

V. PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

- Masukan : Rp. 1.049.900.500 Realisasi: Rp 1.048.003.578 ,99,84 %
- Keluaran : Terkelolanya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Hasil : Terlaksananya Tata Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, Tersedianya Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah, Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan.
- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

- Masukan : Rp. 44.518.700 Realisasi: Rp. 44.518.700, 100,00 %
- Keluaran : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- Hasil : Frekuensi Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan. Data dan informasi kegiatan non prosedural pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan dalam rangka mendukung kegiatan Perlindungan Hutan, Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan dan pencurian hasil hutan

- Permasalahan: -
- Solusi : -

VI. PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

- Masukan : Rp 16.150.000 Realisasi: Rp 16.150.000, 100,00 %
- Keluaran : Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun.
- Hasil : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
- Permasalahan: Tidak Terlaksananya Montoring Pembinaan
- Solusi : Melaksanakan kegiatan Monitoring

VII. PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

- Masukan : Rp. 246.088.000 Realisasi: Rp. 246.088.000, 100,00 %
- Keluaran : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan.
- Hasil : Tercapaiya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Permasalahan: -
- Solusi : -

BAB V

HAMBATAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan pembangunan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah yang perlu mendapat perhatian yaitu :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Maksimalnya Kelestarian Fungsi Ekosistem dalam Pembangunan Berkelanjutan	Luas lahan kritis yang semakin bertambah	Perusakan Dan Penipisan Sumber Daya alam, deforestasi hutan dan lahan
2	Menurunnya Presentase Kontribusi sumber Daya Hutan Terhadap Perekonomian	Manfaat Ekonomi Hutan yg bersumber dari Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK) belum dikembangkan dengan maksimal	Adanya Ketimpangan Suplai demand bahan baku hasil hutan kayu pada industri kehutanan
3	Belum Tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat	Masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat dalam program perhutanan sosial	Masih Belum adanya Legalitas atas Akses Kelola dari Kementerian LHK
4	Belum maksimalnya Penguatan Tata kelola dan kelembagaan bidang kehutanan	Belum Optimalnya Penegakan Supremasi hukum di bidang kehutanan dan kapasitas, Kompetensi, Profesionalitas SDM Kehutanan	Adanya ketimpangan antara beban kerja (diluar kawasan hutan) dengan dukungan SDM dan sarana Prasarana

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan pelaporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan bahan dan sekaligus mempermudah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT KPH Banawa Lalundu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
												Tolok Ukur	Target		
3															1,402,210,000
3	28														339,080,000
3	28	01													89,357,500
3	28	01	1.06												
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									1,200,000,000						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									294,850,000						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									77,700,000						
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4,600,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		35,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41,227,500
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		17,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20,530,000
									107,490,000						123,613,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		35,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41,204,500
3	28	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		71,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82,409,000
									89,660,000						103,109,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		71,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					82,409,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT KPH Banawa Lalundu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,700,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								20,000,000				23,000,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,250,000	
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,750,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								770,150,000				907,880,000	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								15,000,000				17,250,000	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,250,000	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								134,000,000				154,100,000	
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ha		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,250,000	
3 28 03 1.03 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ha		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,250,000	
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Tersusunnya Laporan Koordinasi Pengendalian Izin Usaha		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,600,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								494,150,000				590,480,000	
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		Tersedianya Dokumen RTnRL Rantek dan RPHJPD		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT KPH Banawa Lalundu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Berkurangnya Lahan Kritis Di Luar Kawasan Hutan Negara		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Ha		444,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			532,980,000	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Produksi dan Distribusi Bibit Kehutanan dan MPTS		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12000 Bibit		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,000,000	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								103,000,000				118,450,000	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan dan Lahan		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89,700,000	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Terlaksananya Pertemuan Dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Kelompok		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28,750,000	
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								24,000,000				27,600,000	
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah Unit Industri Yang Melaksanakan Penataan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan Dalam Rangka Pemanfaatan Hasil Hutan Secara Tertib		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Industri		24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,600,000	
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								60,000,000				69,000,000	
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam								60,000,000				69,000,000	
3 28 04 1.03 04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,000,000	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								75,000,000				86,250,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								75,000,000				86,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPT KPH Banawa Lalundu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		Terlaksananya Pelatihan Teknis Bagi SDM KPH		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,250,000	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Terlaksananya Klas Kelompok Tani Dari Tingkat Pemula Ke Tingkat Madya		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kelompok		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,500,000	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksanya Usulan Perijinan HKM,HD,HTR dan Kemitraan		Kab. Donggala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kelompok		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,500,000	
TOTAL									1,200,000,000				1,402,210,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPT KPH Kulawi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,000,000	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 1 Paket		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
									90,000,000				108,000,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket 1 Paket		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,000,000	
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
									874,000,000				1,048,800,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
									80,000,000				96,000,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi													
3 28 03 1.01 01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersedianya Dokumen Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Terlaksananya Kegiatan Penataan Blok/Petak di KPH		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Km		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
									40,000,000				48,000,000	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)													
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
									200,000,000				240,000,000	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung													
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		Termonitornya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Unit		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
3 28 03 1.03 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		Termonitornya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPT KPH Kulawi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Termonitornya dan Terevaluasinya Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Unit		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
3 28 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		Termonitornya dan Terevaluasinya Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Terlaksananya Pemanfaatan Hutan di KPH		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ha		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								275,000,000				330,000,000	
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		Tersedianya Dokumen RTnRL, Rantek dan RPH/JPD		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Berkurangnya Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Ha		155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			186,000,000	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Tersedianya Bibit Penghijauan Lingkungan		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15000 Batang		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000	
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan		Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis (Gully Plug/Sumur Resapan)		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	
3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Terpeliharanya Bangunan Persemaian Semi Permanen		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		Terlaksananya Pertemuan Bersama KTH dalam rangka Pelaksanaan RHL		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kelompok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								129,000,000				154,800,000	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan dan Lahan		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Lokasi		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			108,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPT KPH Kulawi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Tersedianya papan himbauan/peringatan kehutanan		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Buah		13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,600,000	
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan		Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengolah Hasil Hutan		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kelompok		11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,200,000	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Penyelesaian Permasalahan Perlindungan dan Pengamanan Hutan		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000	
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								90,000,000				108,000,000	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Pengembangan Tanaman HHBK di Kawasan Hutan		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Ha		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		Terminnya Bahan Baku HHBK untuk Pemenuhan Industri		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Lokasi		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Terlaksananya Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Lokasi		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								50,000,000				60,000,000	
3 28 03 1.07 01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Termonitornya Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/tahun		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	
3 28 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan								10,000,000				12,000,000	
3 28 03 1.09 01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengejar Benih dan/atau Bibit Terdaftar		Terpenuhinya Sumber Benih yang Terdaftar dan Bersertifikat		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								36,000,000				43,200,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								36,000,000				43,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPT KPH Kulawi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		Terlaksananya pelatihan teknis penyuluh dan SDM Kehutanan		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Orang		11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,200,000	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Terlaksananya Peningkatan Kelas Kelompok Tani dari Tingkat Pemula ke Tingkat Madya		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kelompok		11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,200,000	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksananya Usulan Perizinan HKM, HD, HTR dan Kemitraan		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kelompok		14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,800,000	
									30,000,000				36,000,000	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								30,000,000				36,000,000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								30,000,000					
3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS		Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan DAS		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 06 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		Terlaksananya BINWASDAL Rehab DAS Pemegang IPPKH		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Pemegang Izin		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS		Terlaksananya BINWASDAL Pengelolaan DAS di KPH		Kab. Sigi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
TOTAL									1,400,000,000				1,680,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPT KPH Sintuwu Maroso

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Penataan Blok/Petak di KPH		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		50 Km		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		1 paket		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			588,000,000
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					15,000,000				18,000,000		
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan Produksi		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		100 Ha		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin Usaha atau Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		2 kali		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Pengelolaan didalam Kawasan Hutan Produksi		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		0 Kegiatan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					580,000,000				696,000,000		
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersedianya Dokumen RTnRL Rantek dan RPHJPD		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		3 Dok		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,000,000
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Berkurangnya Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		100 Ha		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			420,000,000
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya Bibit Penghijauan Lingkungan		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		20000 batang		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			240,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					110,000,000				131,000,000		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan dan Lahan		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		12 kali		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengelolah Hasil Hutan		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		6 kelompok		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPT KPH Sintuwu Maroso

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Penyelesaian Permasalahan Perlindungan dan Pengamanan Hutan		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		2 kali		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)								5,000,000				6,000,000	
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu		Tersedianya Data dan Tertib Peredadaran HHBK pada Kerjasama Pemanfaatan Hutan (Punguitan HHBK)		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		1 Dok		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
3 28 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan								5,000,000				6,000,000	
3 28 03 1.09 05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit		Tersedianya bibit/benih kehutanan yang bersertifikat dan terdaftar		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		0 kali		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								25,000,000				30,000,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								25,000,000				30,000,000	
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		Terlaksananya Pelatihan Teknis bagi SDM KPH		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		3 orang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Terlaksananya Peningkatan Kelas Kelompok Tani dari Tingkat Pemula ke Tingkat Madya		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		1 Kelompok		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksananya usulan perizinan HKM, HD, HTR dan Kemitraan		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		7 kelompok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								10,000,000				12,000,000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								10,000,000				12,000,000	
3 28 06 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		Terciptanya masyarakat yang paham dan peduli terhadap pengembangan DAS		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		0 kelompok		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS		Terbentuknya Kelompok Tani Hutan yang Handal		Kab. Poso, Poso Kota, Gebangrejo		1 kelompok		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
TOTAL									1,300,000,000				2,147,080,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPT KPH Sivia Patuju

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3	28	03	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					20,000,000				24,000,000		
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit usaha yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan secara tertib	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2	Unit		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,000,000
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin Usaha atau Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2	Kali		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,000,000
3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					595,000,000				655,200,000		
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RThRL)	Tersedianya dokumen RThRL Rantek dan RPHJpd	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3	Dok		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33,600,000
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Kritis Berkurang	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150	Ha		410,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		448,000,000
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya bibit penghijauan lingkungan	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20000	bibit		155,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		173,600,000
3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					50,000,000				56,800,000		
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan dan Lahan	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100	%		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44,800,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya pertemuan dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3	Kelompok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,000,000
3	28	03	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					10,000,000				11,200,000		
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terbentuknya Kerja sama Pemungutan HHBK	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16	PKS		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11,200,000
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					20,000,000					22,400,000		
3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					20,000,000				22,400,000		
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya peningkatan kelas kelompok tani dari tingkat pemula ke tingkat madya	Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1	KTH		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11,200,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPT KPH Sivia Patuju

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksanya usulan perizinan HD, HKm, HTR, Hutan adat dan Kemitraan		Kab. Tojo Una Una, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Kelompok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,200,000
TOTAL									1,100,000,000				1,223,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPT KPH Balantak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,400,000	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80,500,000				96,600,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,000,000	
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,600,000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								517,000,000				620,400,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi								190,000,000				228,000,000	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Terlaksananya Kegiatan Penataan Blok/Petak di KPH		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Km		190,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			228,000,000	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)								30,000,000				36,000,000	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,000,000	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung								80,000,000				96,000,000	
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Tersedianya Data dan Informasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan Produksi		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 Ha		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			96,000,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara								15,000,000				18,000,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Berkurangnya Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Ha		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Tersedianya Bibit Penghijauan Lingkungan		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20000 Batang		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								152,000,000				182,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0009 UPT KPH Balantak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dan Lahan		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		132,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158,400,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pertemuan Bersama KTH Dalam Rangka Pelaksanaan RHL		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kelompok		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,000,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					50,000,000					60,000,000	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Industri Yang Melaksanakan Penataan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan Dalam Rangka Pemanfaatan Hasil Hutan Secara Tertib		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Industri		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					33,000,000					39,600,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					33,000,000					39,600,000	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Peningkatan Kelas Kelompok Tani Dari Tingkat Pemula ke Tingkat Madya		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kelompok		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,600,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Usulan Perijinan HKM, HD, HTR, HR, dan Kemitraan		Kab. Banggai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kelompok		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,000,000
TOTAL											1,000,000,000				1,200,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPT KPH Pulau Peling

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3	28	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50,000,000				52,000,000		
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		50,000,000			52,000,000
3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					173,049,000				208,244,494		
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,200,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				26,709,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32,046,534
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		145,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		174,997,960
3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28,279,000				33,934,806		
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		23,279,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27,934,806

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPT KPH Pulau Peling

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					440,121,000				528,146,709		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					51,181,000				61,417,610		
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Tersedianya Data dan Informasi Potensi Hasil Hutan di Kawasan Hutan Produksi		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Ha		51,181,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61,417,610
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					321,751,000				386,101,339		
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		Tersedianya dokumen RTnRL, Rantek dan RPHJPD		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,000,000
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		berkurangnya lahan kritis di luar kawasan hutan		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Ha		265,951,000				319,141,339

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPT KPH Pulau Pejing

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Tersedianya bibit penghijauan lingkungan		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20000 Bibit		45,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54,960,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								67,189,000			80,627,760
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Terlaksananya patroli pengamanan hutan dan lahan		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kali		55,689,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		66,827,760
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Menurunnya Jumlah Hotspot pada Kawasan Non Konservasi dan Lahan Masyarakat		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		11,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,800,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								53,344,000			64,014,572
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								53,344,000			64,014,572
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		Terlaksananya pelatihan teknis bagi SDM KPH		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Orang		22,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27,069,372

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPT KPH Pulau Peling

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Terlaksananya peningkatan klas kelompok tani dari tingkat pemula ke tingkat madya		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2	Kelompok		25,987,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,185,200
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksananya usulan perizinan HKM, HD,HTR.HR dan Kemitraan		Kab. Banggai Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banggai Laut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2	Kelompok		4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,760,000
TOTAL														900,000,000			1,062,590,001	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPT KPH Tepo Asa Aroa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
3																				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																			
																	1,300,000,000	1,560,000,000		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	430,000,000	516,000,000	
																		0	0	
3	1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		0	0
3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													0	0	
3	1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																		85,000,000	102,000,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													30,000,000	36,000,000	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													15,000,000	18,000,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													40,000,000	48,000,000	
3	1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		0	0
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														0	0
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel														0	0
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														0	0
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														0	0
3	1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		175,000,000	210,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														35,000,000	42,000,000
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														140,000,000	168,000,000
3	1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		170,000,000	204,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPT KPH Tepo Asa Aroa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	28	01	1.09	02								120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,000,000	
3	28	01	1.09	10								50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					770,000,000						924,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					200,000,000							240,000,000
3	28	03	1.01	01								100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
3	28	03	1.01	02								100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					100,000,000						120,000,000	
3	28	03	1.03	08								100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					270,000,000						324,000,000	
3	28	03	1.04	01								20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,000,000	
3	28	03	1.04	02								100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
3	28	03	1.04	04								150,000,000				180,000,000	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					100,000,000						120,000,000	
3	28	03	1.05	04								70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,000,000	
3	28	03	1.05	05								30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,000,000	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)					50,000,000						60,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPT KPH Tepo Asa Aroa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu							50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun							50,000,000				60,000,000
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun							25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun							25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							100,000,000				120,000,000
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan							100,000,000				120,000,000
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan							50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial							50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,000,000
TOTAL											1,300,000,000				1,560,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0012 UPT KPH Tepe Asa Maroso

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
3															
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					1,200,000,000					1,440,000,000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					485,000,000					582,000,000
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					143,000,000					171,600,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			72,000,000
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,000,000
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		58,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,600,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					162,000,000				194,400,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		27,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,400,000
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun		135,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			162,000,000
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180,000,000				216,000,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,000,000
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					685,000,000				822,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi					60,000,000				72,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0012 UPT KPH Tepe Asa Maroso

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah unit industri yang melaksanakan penataan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan secara tertib		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Industri		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								20,000,000					24,000,000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								20,000,000					24,000,000
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Terlaksananya peningkatan kelas kelompok tani dari tingkat pemula ke tingkat madya		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kelompok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksananya usulan perijinan HKM,HD,HTR,HR dan Kemitraan		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kelompok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								10,000,000					12,000,000
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								10,000,000					12,000,000
3 28 06 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		Terciptanya Masyarakat yang Paham dan Peduli terhadap pengelolaan DAS		Kab. Morowali, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kelompok		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
TOTAL									1,200,000,000					1,440,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0013 UPT KPH Gunung Dako

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3																	
																	1,559,000,000
3	28																407,000,000
3	28	01															340,000,000
3	28	01	1.06														85,000,000
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		55,000,000					65,000,000
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,000,000
3	28	01	1.08														105,000,000
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				78,000,000
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor				1 Paket		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				48,000,000
3	28	01	1.09														150,000,000
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				180,000,000
3	28	03															960,000,000
3	28	03	1.01														15,000,000
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersedianya Dokumen Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000
3	28	03	1.03														40,000,000
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya data dan informasi potensi hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan produksi		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ha		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin Usaha atau Pelaksanaan Kerjasama pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kali		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000
3	28	03	1.04														785,000,000
																	942,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0013 UPT KPH Gunung Dako

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Berkurangnya Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Ha		700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			840,000,000
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Tersedianya bibit penghijauan lingkungan		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25000 batang		85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			102,000,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi							120,000,000				144,000,000
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan dan Lahan		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kali		85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			102,000,000
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Penyelesaian Permasalahan Perlindungan dan Pengamanan Hutan		Kab. Toli Toli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali		35,000,000				42,000,000
TOTAL												1,300,000,000			1,559,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0014 UPT KPH Pogogul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3													1,066,860,497	
3	28								900,000,000				361,803,229	
3	28	01							322,461,070				97,406,229	
3	28	01	1.06						84,701,070					
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,531,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,111,765	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	32,202,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37,033,162	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	3,166,350				3,641,302	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	18,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,620,000	
3	28	01	1.07						82,900,000				95,335,000	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan Mebeleur	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,250,000	
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000	
3	28	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	47,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,085,000	
3	28	01	1.08						86,430,000				90,367,500	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	26,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,187,500	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	60,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,180,000	
3	28	01	1.09						68,430,000				78,694,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0014 UPT KPH Pogogul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		31,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36,397,500
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,750,000
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		31,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36,547,000
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											485,362,930			599,054,868		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											26,250,000			30,187,500		
3	28	03	1.01		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH		Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional KPH		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		26,250,000			30,187,500
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)											17,750,000			21,300,000		
3	28	03	1.02		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan								17,750,000			21,300,000
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											100,873,266			156,004,255		
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		Tersedianya Data dan Informasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan Produksi		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ha		11,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,282,500
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		Tersedianya Data dan Informasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan Lindung		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Ha		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin Usaha atau Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kali		11,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,282,500
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung		Monitoring dan Evaluasi Pemegang Izin Usaha atau Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0014 UPT KPH Pogogul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH		Terlaksananya Pemanfaatan Hutan di KPH		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2	Kegiatan		66,223,266	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		76,156,755
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		Tercapainya Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa lingkungan		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3	Lokasi		11,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,282,500
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara									213,675,000			245,726,250
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara		Berkurangnya Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100	Ha		34,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39,761,250
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Tersedianya bibit penghijauan lingkungan		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50000	Batang		130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		149,500,000
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan		Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis (Gully Plug/Sumur Resapan)		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4	unit		11,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,282,500
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan		Terpeliharanya bangunan persemaian semi permanen		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1	unit		26,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29,900,000
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		Terlaksananya Pertemuan Bersama KTH dalam Rangka Pelaksanaan RHL		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4	KTH		11,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13,282,500
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi									80,799,664			92,919,613
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Penyelesaian Permasalahan Perlindungan dan Pengamanan Hutan		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Kali		59,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68,287,000
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4	Kali		21,419,664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24,632,613
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)									46,015,000			52,917,250

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sub Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0014 UPT KPH Pogogul

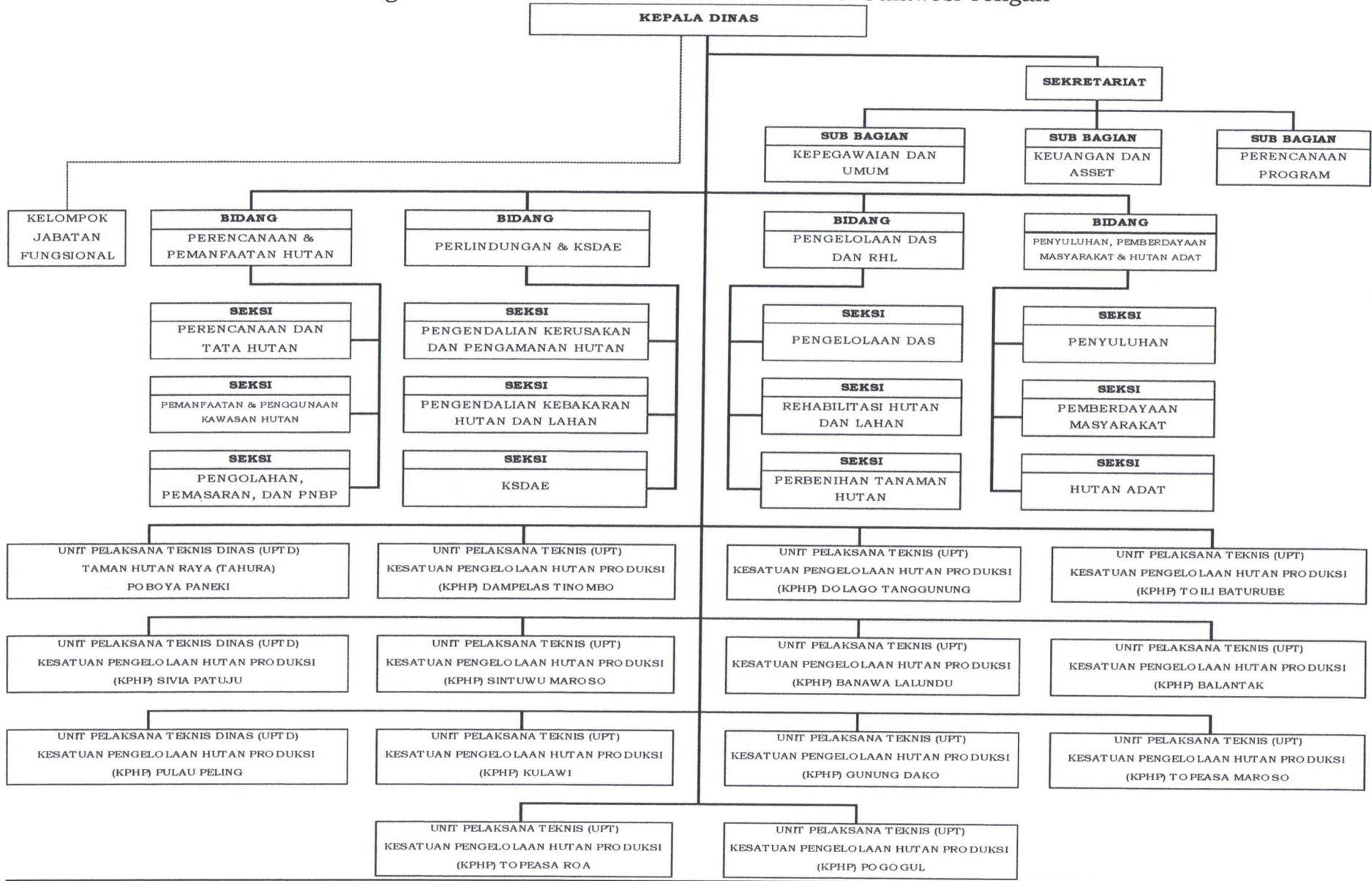
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Terlaksananya Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Lokasi		11,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,282,500	
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya		Terlaksananya budidaya Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak mengurangi Fungsi Pokoknya		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Ha		11,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,282,500	
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu				Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				22,915,000				26,352,250	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								92,176,000				106,002,400	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								92,176,000				106,002,400	
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Terlaksananya peningkatan klas kelompok tani dari tingkat pemula ke tingkat madya		Kab. Buol, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Kelompok		46,088,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53,001,200	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial								46,088,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53,001,200	
TOTAL									900,000,000				1,066,860,497	

**Tabel Gangguan Keamanan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022**

No	Unit Pelaksana Teknis KPH	Tahun	Tipe Gangguan (Illog, Perambahan, PETI, TSL, Karhut)	Deskripsi Permasalahan	Lokasi		Koordinat (Decimal Degree, WGS 84)		Pelaku/ Tersangka	Penanganan Barang Bukti (Sita / Lelang)	Ket
					Wilayah Administrasi	Kawasan Hutan	X	Y			
2	Sulawesi Tengah UPT KPH. Kulawi	2022	Perambahan	Ditemukan Pembukaan Jalan berupa jalan kantong produksi dengan Panjang ± 2,5 KM dan lebar ± 4 Meter	Kec. Dolo Selatan Desa Wisolo	HL	119° 52' 16,6" E 119° 50' 46,07" E	01° 08' 32,3" S 01° 08' 30,46" S	Masyarakat Desa Wisolo	Melakukan Pendataan Pelaksana dan meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Wisolo	1Ha
3	Sulawesi Tengah UPT KPH. Kulawi	2022	Perambahan	Ditemukan pembukaan lahan berupa lahan terbuka dikemiringan sekitar 60° - 75°	Kec. Dolo Barat Desa Mantikole	HL	119° 51' 46,26" E 119° 51' 41,44" E	01° 05' 29,51" S 01° 05' 31,64" S	Masyarakat Desa Bobo/Mantikole	Melakukan Pendataan Pelaku Pembukaan Lahan	1 Ha
4	Sulawesi Tengah UPT KPH. Kulawi	2022	Perambahan	Ditemukan Lahan kebun Masyarakat dikemiringan sekitar 35° - 50°	Kec. Dolo Barat Desa Bobo	APL	119° 52' 01,41" E 119° 51' 58,04" E	01° 05' 38,51" S 01° 05' 40,25" S	Masyarakat Desa Bobo	Melakukan Pendataan Pelaku Pembukaan Lahan	2 Ha
5	Sulawesi Tengah UPT KPH. Banawa Lalundu	2022	Illegal Logging	Ditemukan tumpukan kayu pacakan yang di duga dari wilayah hutan Sulawesi Tengah tanpa pemilik	Kec. Rio Pakava Desa Tawiora	APL			diduga masyarakat Desa Banggaiba	Membuat laporan kejadian (LK) dan laporan tertulis	0,5 Ha
6	Sulawesi Tengah UPT KPH. Banawa Lalundu	2022	Illegal Logging	Ditemukan tumpukan kayu pacakan yang di duga dari wilayah hutan Sulawesi Tengah tanpa pemilik	Kec. Banawa Selatan Desa Malino	APL	119° 47' 83" E	00° 45' 47,11" S	diduga masyarakat asli Topo da'a	Membuat laporan kejadian (LK) dan laporan tertulis	0,5 Ha
7	Sulawesi Tengah UPT KPH. Dampelas Tinombo	2022	Illegal Logging	Ditemukan tumpukan kayu pacakan yang di duga dari wilayah hutan Sulawesi Tengah tanpa pemilik	Kec. Rio Pakava Desa Tawiora	APL			diduga masyarakat Desa Banggaiba	Membuat laporan kejadian dan laporan tertulis	0,5 Ha

8	Sulawesi Tengah UPT KPH. Gunung Dako	2022	Penambangan tanpa izin	Kegiatan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) dalam Kawasan Hutan di Perbatasan Kab Tolitoli dan Buol	Kokobuka/janja	HP	1 121 28 E	0 47 26 N	Pemodal tambang liar	Pemusnahan lokasi kerja tambang liar	10 Ha
9	Sulawesi Tengah UPT KPH. Dampelas Tinombo	2022	Perambahan	Kegiatan Pembukaan Jalan Dalam Kawasan Hutan dengan Tujuan Pengambilan Potensi Emas	Kec. Tinombo Selatan Desa Bondoyong	HP	120 12 7 BT	0 14 37 LU	Pemodal tambang liar	Membuat laporan kejadian dan laporan tertulis	0,5 Ha
10	Sulawesi Tengah UPT KPH.Dolago Tanggunung	2022	Penambangan tanpa izin	Pertambangan Emas Tanpa Izin di Luar Kawasan Hutan namun sudah dekat Kawasan dan mencemari Lingkungan	Parigi Barat Desa Kayuboko	APL			Pemodal tambang liar	Membuat laporan kejadian dan laporan tertulis	2 Ha
11	Sulawesi Tengah UPT KPH.Dolago Tanggunung	2022	Perambahan	Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Oti	Kec. Sindue Tobata Desa Oti	HL	119,87788	-0,38618	Pemodal tambang liar	Membuat laporan kejadian dan laporan tertulis	15 Ha
12	Sulawesi Tengah UPT KPH.Sintuvu Maroso	2022	Peredaran HHBK	Pengolahan Getah Pinus di Desa Uelincu oleh Masyarakat perlu penataan yang lebih baik	Uelincu/ Pamona Utara	HP			Masyarakat Desa Pandjoka	Proses hukum selanjutnya diserahkan ke Gakkum KLHK seksi 2 Palu	1 Ha
13	Sulawesi Tengah UPT KPH.Tepo Asa Maroso	2022	Pengelolaan Hasil Hutan Kayu	Beroperasinya beberapa sirkel tanpa izin dengan mengolah sumber bahan baku yang sah serta adanya kegiatan Tambang diatasnya masih terdapat tegakan namun belum memiliki izin pemanfaatan tegakan diatasnya	Kec. Pagimana Desa Siuna	HPT	00° 44' 166" S	122° 55' 010" E	Masyarakat Desa Pasir Lamba	Membuat laporan tertulis	10 Ha
JUMLAH KAWASAN											45 Ha

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	Hasil		Satuan	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	$\frac{\text{Jumlah RHL yg dilaksanakan}}{\text{Luas Lahan Kritis di Sulteng}} \times 100\%$	13671	5,19	%	Dinas Kehutanan Prov.Sulteng	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
				263202,86				
2	Meningkatnya areal kelola dan manfaat sosial oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya hutan	Persentase Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	$\frac{\text{Jumlah usulan PS yg dapat di fasilitasi}}{\text{Luas PIAPS (peta indikatif areal perhutanan sosial)}} \times 100\%$	4709	1,62	%	Dinas Kehutanan Prov.Sulteng	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat
				291000				